

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Civics, selain bertujuan membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu dan mampu melaksanakan hak-hak kewajibannya sebagai warga negara, *Civics* juga bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang mampu membudayakan lingkungannya serta mampu memecahkan masalahnya masalah-masalah individu warga negara yang mampu memecahkan masalahnya secara individual maupun masyarakat sekitarnya. Metode-metode pengembangan *Civics* dan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya menggunakan metode-metode saintifik seperti juga halnya dengan disiplin ilmu lainnya namun satu hal yang menonjol dari metode dan pendekatan *Civics* dan *Civic Education* lebih pada pendekatan integratif dengan metode yang multidisipliner. Sebagai sebuah program pendidikan yang didasarkan pada berbagai pertimbangan diantaranya politik dan psikologis maka objek studinya adalah individu warga negara (Aziz Wahab dan Sapriya, 2011, hlm :29).

Pada tahun 1990-an, selanjutnya berkembang mata pelajaran *Civics* yang berisikan materi mengenai struktur, mekanisme dan praksis pemerintahan negara bagian dan federal (Gross dan Zeleny:1958). Dalam konteks itu pakar pendidikan lainnya, Dunn (1915) mengembangkan gagasan *new Civics* atau **pendidikan kewarganegaraan baru** yang isi dan proses menitikberatkan pada konsepsi tentang *community living* atau kehidupan masyarakat. Sampai tahun 1920-an ternyata istilah *Civics* telah digunakan untuk menunjukkan suatu program kurikuler yang lebih khusus, yakni *vocational civics*, *community civics* dan *economic civics* (Gross dan Zeleny:1958) atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata keterampilan/pencapaian, kemasyarakatan, dan perekonomian. Jika dilihat dari tujuan mata pelajaran *civics* pada tahun 1900-an itu, memusatkan perhatian pada pengembangan *social skills and civics competence* (Allen:1960) atau keterampilan sosial dan kompetensi kewarganegaraan. Kemudian Best (1960) menambahkan *the ideas of good character*, yakni gagasan dan instrumentasi tentang tentang karakter atau watak yang baik (Winaputra, 2015 hlm :83-85).

Dari uraian tersebut Winataputra (1978 dan 2001) melihat bahwa istilah-istilah *civics* dan *civic education*” ternyata lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk

mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik (Chreshore: 1886; Allen:1960; Somantri:1972). Sedangkan *citizenship education*, dengan menggunakan konsep Joyce dan Weil (1968) lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan *intructional effects* dan *nurturant effects* dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik (Dimond:1953; Gross dan Zeleny:1958; Allen:1960; NCSS:1972; Somantri:1972; Cogan dan Derricoott:1998) (Winaputra, 2015 hlm :83-85).

Merujuk pada berbagai hasil kajian filosofis, sosiologis, yuridis, dan pedagogis, dalam konteks konsepsi utuh pengembangan kurikulum 2013 dilakukan strategi penguatan dan penyempurnaan secara komprehensif terhadap mata pelajaran PPKn dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai berikut.

1. Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
2. Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter yang bersumberkan nilai-nilai dan moral Pancasila.
3. Mengorganisasikan pengembangan kompetensi dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi peserta didik secara utuh dan koheran dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai norma dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh dalam bingkai Kompetensi Inti (sikap, pengetahuan, keterampilan).
5. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn yang mengintegrasikan sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan dalam wadah tanggung jawab dan partisipasi kewarganegaraan.

Dengan perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Muatan PPKn secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila dengan keseluruhan tuntunan psikopedagogis dan sosial-kultural warga negara dalam konteks kebudayaan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Dengan demikian PPKn lebih memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut.

1. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama dengan *civic education di USA citizenship education di UK, talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.
2. PPKn sebagai nomenklatur atau nama diri dalam kurikulum satuan pendidikan pada jenjang formal dan pendidikan nonformal secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bersifat legitim/syah (sebagai salah satu nama diri dalam bingkai nama jenis pendidikan kewarganegaraan. (ditulis dalam huruf kecil).
3. PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/ karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikosial kewarganegaraan Indonesia sangat koherten dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termatub dalam pasal Pasal 3 UU N0. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
4. PPKn sebagai mata pelajaran dengan visi, isi dan paradigmanya yang baru didukung oleh dinamika akademin yang selama ini menjadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu kajian keilmuan dalam ilmu pendidikan.

Sebagai wahana pendidikan mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan yakni: (1) pengetahuan kewarganegaraan; (2) sikap kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan; (4) keteguhan kewarganegaraan; (5) komitmen kewarganegaraan; dan (6) kompetensi kewarganegaraan (Winataputra,2015 hlm:185-188).

Secara khusus PPKn di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut bertujuan mengembangkan potensi peserta didik sehingga mampu :

- (a) Menampilkan karakter yang mencerminkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- (b) Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (c) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- (d) Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural. (Winataputra,2015 hlm:185-188).

Hal yang patut disayangkan dalam rentang sejarah tersebut adalah adanya beberapa masa distorsi hakikat pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan yang diintervensi kepentingan penguasa terutama pada masa lalu seringkali dimanfaatkan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan menciptakan suatu quo.

Hendry Randall White dalam majalah *Tje Citizen and Civics*, pada tahun 1886, merumuskan pengertian *Civics* dengan “*The science of citizenship, the relation of man, the indivual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state.*” Dari definisi tersebut, *Civics* dapat diterjemahkan sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi.¹ Sementara **Edmonson** di tahun 1958 merumuskan, “*Civics is the element of political science or that branch of political science dealing with the rights and duties of citizen*” (*Civics* adalah sebagai ilmu politik yang membahas hak dan kewajiban warga dari sebuah negara).²(Erwin, 2017 : 2 edisi ke empat).

Indonesia pun telah menggariskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ini sebagai matakuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan pada setiap fakultas, jurusan, ataupun program studi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sebagaimana setiap negara-negara di dunia senantiasa menambatkan pendidikan kewarganegaraannya pada filsafat

bangsanya masing-masing. Begitupun Indonesia yang telah merumuskan pendidikan kewarganegaraannya yang berbasis pada filsafat bangsa Indonesia, yakni Pancasila (Erwin, 2017 : 2 edisi ke empat).

Menurut **Mansoer**, pada hakekatnya Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan hasil dari sintesis antara *civic education*, *democracy education*, serta *citizenship* yang berlandaskan pada filsafat serta mengandung identitas nasional Indonesia serta materi muatan tentang bela negara. Dengan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang berbasis Pancasila tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia merupakan pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan yang berhadapan dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Demokrasi, HAM dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia dengan menggunakan Filsafat Pancasila sebagai pisau analisisnya (Erwin, 2017 : 3 edisi ke empat).

Dari uraian pendapat para ahli tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan ilmu yang diharapkan dapat mengembangkan karakter peserta didik yang membentuk sebuah watak karakter yang baik yang bisa atasi masalah-masalah tersebut sesuai keterampilan yang dimilikinya pada setiap masalah.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ilmu yang diharapkan menjadi yang bisa memudahkan untuk membentuk karakter dengan berbagai keterampilannya yaitu pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Ketiga keterampilan tersebut harus mampu berkembang di dalam diri peserta didik sehingga dalam pengembangan akan mudah untuk menyesuaikan diri dalam lingkungannya.

Perkembangan ilmu kewarganegaraan memiliki pengaruh yang sangat signifikan karena berkontribusi dalam perkembangannya pada dunia pendidikan, maka untuk itu diperlukan perubahan paradigma yang bisa berkontribusi untuk perkembangan pendidikan. Pendidikan karakter yang menjadi perubahan untuk membangun peserta didik yang bisa mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dengan memahami aspek kenegaraan melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diharapkan bisa mewujudkan manusia yang berkompetensi secara keilmuan.

1.2 Hakikat Model Pembelajaran *Discovery Learning*

Kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari adanya penerapan model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi peserta didik.

Nanang Sunarya, 2019

PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING DALAM PPKn UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER JUJUR DAN TANGGUNG JAWAB SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sedangkan bagi guru, model pembelajaran harus mampu menjadikan peserta didik lebih mandiri dalam mengerjakan semua kegiatan pembelajaran serta berperan aktif di dalam pembelajaran tersebut. Hal itu sesuai dengan ide dasar Bruner berdasarkan pendapat Piaget bahwa anak memang harus berperan aktif dalam belajar di kelas. (Lefancois dalam Ementembum, 1986 : 103).

Dalam menciptakan kelas pembelajaran aktif dan menyenangkan, peran guru sangat penting dalam mengatur alur pembelajaran melalui model pembelajaran. Guru harus mempunyai pengetahuan dan paradigma berpikir mengenai konsep pembelajaran yang juga disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Joyce, Weil, dan Calhoun (2016 : 8) menyatakan bahwa dalam pemilihan model-model pembelajaran, mereka memilih model-model yang merupakan repertoar dasar dalam pendidikan untuk dapat mencapai sebagian besar tujuan sekolah dengan standar yang tinggi sehingga peserta didik dapat meraih banyak tujuan yang dicita-citakan dan menjadi siswa luar biasa di sekolah yang hebat. Teknik yang mereka gunakan yaitu dengan mengombinasikan model-model pembelajaran sehingga sekolah dapat merancang kurikulum yang tepat di dalam pembelajaran.

Salah satu model pembelajaran yang saat ini direkomendasikan di dalam pembelajaran, yaitu model *Discovery Learning*. Di dalam buku Materi pelatihan kurikulum 2013 (2014 : 35) menjelaskan bahwa pembelajaran yang mengaplikasikan model *Discovery Learning* secara berulang-ulang ternyata dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. Penggunaan *Discovery Learning* ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah Pembelajaran yang *teacher oriented ke student oriented*. Merubah modus *Ekspository* siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus *Discovery* siswa menemukan informasi sendiri

Hal di atas disebabkan oleh karakteristik pembelajaran *Discovery Learning* yang ternyata mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (*inquiry*) dan *Problem solving*. Joyce, Weil, dan Calhoun (2016 : 377) menjelaskan lebih lanjut dengan menyebutkan sebenarnya tidak adanya perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini, *Discovery Learning* lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan *discovery* ialah bahwa pada *discovery* masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada *inkuiri* masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian, sedangkan *Problem solving* lebih memberi tekanan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Akan tetapi prinsip belajar yang nampak jelas dalam *Discovery Learning* adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final atau tetapi siswa sebagai peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk (*konstruktif*) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. (Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013, hlm 35)

Dengan demikian, setiap model yang terpilih membantu peserta didik memperbaiki repertoar strateginya untuk pembelajaran memerlukan guru yang belajar bagaimana para murid belajar dan membantu mereka memperluas kemampuannya untuk melakukannya.

Sehingga model pembelajaran dapat membantu para siswa bertanggung jawab untuk pembelajaran dan memisahkannya. Bahkan, ketika sangat bersifat direktif, yang dapat contoh ketika memperkenalkan para siswa dengan cara-cara pembelajaran baru, kami menekankan bahwa mereka perlu membangun kemampuan untuk semakin bertanggung jawab bagi pembelajaran mereka. Kita berpindah dari kebutuhan untuk menyediakan pelatihan ekstensif kepada para siswa ke situasi dimana para siswa melatih diri mereka sendiri.

Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu :

1. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah:
 - a. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial dan kompetensi vokasional atau yang dulu diistilahkan dengan domain kognitif, afektif atau psikomotor?
 - b. Bagaimana kompleks tujuan pembelajaran yang ingin dicapai?
 - c. Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik?
2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran :
 - a. Apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum atau teori tertentu?
 - b. Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat atau tidak?
 - c. Apakah tersedia bahan atau sumber-sumber yang relevan untuk mempelajari materi itu?
3. Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa
 - a. Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik?
 - b. Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik?
 - c. Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik?
4. Pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis
 - a. Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja?
 - b. Apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat digunakan?
 - c. Apakah model pembelajaran itu memiliki nilai efektivitas atau efisiensi?

Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan model ini adalah dapat memberikan suatu kondisi yang menjadi pedoman untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan pola-pola pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya sekedar menghafal. Melainkan suatu proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung. Yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Didasari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran (Rusman, 2011 hlm:133-134).

Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, pemahaman konteks siswa menjadi bagian yang penting, karena dari sinilah seluruh perancangan proses pembelajaran dimulai. Hubungan antara guru dan siswa menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Otonomi siswa dan subyek pendidikan menjadi titik acuan seluruh perencanaan dan proses pembelajaran. Dengan mengacu pada pembelajaran aktif dan inovatif. Inovasi pendidikan (*education innovation*) adalah pembaharuan pendidikan secara parsial berskala sekolah atau kelas, dengan objek pembaharuan mengenai salah satu komponen pendidikan (Sukardjo & Das salirawati, 2008) Santyasa (2005 :5) (Hanafiah,2010 hlm : 121).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebuah proses pembelajaran memerlukan suatu penerapan model yang dapat memberikan motivasi siswa yang dapat mengkondisikan dalam kegiatan pembelajaran. Berbagai potensi peserta didik harus mampu kembangkan dalam menemukan identitas perilaku siswa yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Hal ini penting diperhatikan oleh guru karena guru bukan lagi sebagai penyampai pengetahuan semata tanpa keterampilan khusus melainkan mengajar lebih sering dimaknai sebagai perbuatan yang kompleks.

Maka untuk menunjang keberhasilan kegiatan proses pendidikan dibutuhkan seorang profesional yaitu guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks permasalahan dalam meningkatkan mutu pendidikan saat ini.

Nanang Sunarya, 2019

PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING DALAM PPKn UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER JUJUR DAN TANGGUNG JAWAB SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Proses belajar mengajar secara efektif dan efisien merupakan tujuan pendidikan yang dapat memberikan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga dalam pengembangan perilaku siswa lebih terbangun dengan baik.

Langkah-langkah penerapan Model Pembelajaran *Discovery Learning*

Langkah-langkah dalam mengaplikasikan model *discovery learning* di kelas adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan

- a. Menentukan tujuan pembelajaran
- b. Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya)
- c. Memilih materi pelajaran.
- d. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi)
- e. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa
- f. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dan yang konkret ke abstrak, tau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik
- g. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa

2. Pelaksanaan

Menurut Syah (2004:244) dalam mengaplikasikan metode *Discovery Learning* di kelas ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut.

a. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)

Pertama-tama pada tahapan ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahapan ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.

Nanang Sunarya, 2019

PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING DALAM PPKn UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER JUJUR DAN TANGGUNG JAWAB SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam hal ini Bruner memberikan stimulasi dengan menggunakan teknik bertanya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan demikian seorang Guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai.

b. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)

Setelah dilakukan stimulation langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah) (Syah 2004:244). Sedangkan menurut permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, atau hipotesis, yakni pertanyaan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.

c. Data collection (pengumpulan data)

Ketika eksplorasi berlangsung guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis (Syah, 2004:244). Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

d. Data processing (pengolahan data)

Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah, 2002:22). Data processing disebut juga dengan pengkodean coding/ kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

e. Verification (pembuktian)

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing (Syah. 2004:244). Verification menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

f. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah 2004:244). Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. (*Materi Pelatihan Kurikulum 2013,2014:37*).

3. Kelebihan dan Kekurangan model *Discovery Learning*

Kelebihan Penerapan *Discovery Learning*

- a. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya.
- b. Pengetahuan yang diperoleh sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingat dan transfer.
- c. Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil.
- d. Memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatan sendiri.
- e. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalanya dan motivasi sendiri.
- f. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lain.
- g. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan, bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan sebagai peneliti di dalam diskusi.
- h. Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.
- i. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik;
- j. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru;
- k. Mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri;
- l. Mendorong siswa berfikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri;
- m. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik;
- n. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang;
- o. Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya.
- p. Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa;
- q. Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar;

- r. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

Kelemahan Penerapan *Discovery Learning*

- a. Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran, bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan berfikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustrasi.
- b. Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya.
- c. Pengajar *Discoveri* lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian.
- d. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya PPKn kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa.
- e. Tidak menyediakan kesempatan untuk berfikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.

1.3 Hakikat Karakter Jujur dan Tanggungjawab Siswa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional : 2008) mendefinisikan karakter sebagai sifat – sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Kamus *Webster New Word Dictionary* (Neufeldt : 1984) mendefinisikan karakter sebagai *distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group*. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, *charassein*, yang berarti *to engrave* atau mengukir. Membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas permata atau permukaan besi yang keras. Dari sanalah kemudian berkembang pengertian karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku (*an individuals pattern of behavior... his moral constitution*) (Bohlin, et. Al., 2001: 1). Pengertian tentang karakter. *Pertama*, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus tentulah orang tersebut memanasifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut manifestasikan karakter mulia. *Kedua*, istilah karakter erat

Nanang Sunarya, 2019

PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING DALAM PPKn UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER JUJUR DAN TANGGUNG JAWAB SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kaitannya dengan *'personality*. Seorang baru bisa disebut 'orang yang berkarakter' (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral (Komalasari dan Saripudin,2017 hlm: 2).

Allport (1961 mendefinisikan karakter sebagai penentu bahwa seseorang sebagai pribadi (*character is personality evaluated*). Menurut Freud (2006) *character is striving system wich underly behaviour*. Philip (2008 : 235) mendefinisikan karakter sebagai kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Al Ghazali (2000) menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi (Komalasari dan Saripudin,2017 hlm: 2).

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi; positif, bukan netral. Jadi, 'orang yang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral (tertentu) positif. Dengan demikian,pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk. Hal ini didukung oleh Peterson dan Sligman (2004) yang mengaitkan secara langsung '*character strength*' dengan kebajikan. *Character strength* dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan (virtues). Salah satu kriteria utama dari '*character strength*' adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain (Komalasari dan Saripudin,2017 hlm: 2).

Karakter individu secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa serta olah raga yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Secara psikologis individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagaian sesuai dengan yang dikemukakan Kementerian Pendidikan Nasional (2010a), yaitu "*oleh hati, oleh pikir, olah raga olah rasa dan karsa*".

Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggungjawab. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi cerdas. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi,

dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat dan menarik. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercemin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian kreativitas (Komalasari dan Saripudin, 2017 hlm: 3).

Pendidikan karakter ini merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010c). Dalam Kebijakan Nasional, pendidikan karakter didefinisikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan siswa guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik-unik sebagai warga negara”. Lickona (1992) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai “*deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values.*” Dalam wawancaranya dengan *Early Childhood Today*, Lickona menambahkan bahwa usaha itu tidak terjadi secara otomatis melainkan melalui kerja keras dan tekun. Lickona (1992) dalam bentuk penjelasan lain, mendefinisikan pendidikan karakter ini; “*when we think about the kind of character we want for our children, it’s clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right—even in the face of pressure from without and temptation from within.*” (Komalasari dan Saripudin, 2017 hlm: 16)

Peran sekolah dalam Pendidikan Karakter dalam konteks communities of Character, diletakkan di tengah. Sehingga dalam konteks ini tidak salah Lockwood (1997) mendefinisikan pendidikan karakter itu sebagai “*any school-initiated program, design in cooperation with other community institutions, to shape directly and systematically the behavior of young people by influencing explicitly the nonrelativistically values believed to bring about that behavior*”. Dengan demikian peran sekolah sebagai *communities of character* dalam pendidikan karakter sangat penting. Sekolah mengembangkan proses pendidikan karakter melalui proses pembelajaran, habituasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan kerjasama dengan keluarga dan masyarakat dalam pengembangannya. Sekolah menjadi jembatan penghubung pendidikan karakter di satuan pendidikan dengan keluarga-masyarakat melalui kontekstualisasi nilai kehidupan sehari-hari siswa dalam pembelajaran, serta

pemberdayaan lembaga komite sekolah sebagai wahana partisipasi orang tua-masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan karakter. Di samping itu, pendidikan karakter memang harus mulai dibangun di rumah, dan dikembangkan di lembaga pendidikan sekolah, bahkan diterapkan secara nyata di dalam masyarakat dan bahkan termasuk di dalamnya adalah dunia usaha dan dunia industri (Komalasari dan Saripudin,2017 hlm: 17).

Dr. Sheldon Berman, seorang pengawas sekolah (*sperintendenet of Schools di Hudson Public Schools*), telah melakukan banyak pengamatan akan keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di beberapa sekolah di wilayahnya. Dari hasil pengamatannya, ia yakin akan manfaat dari pendidikan karakter. Menurutnya pendidikan karakter di sekolah yang memfokuskan pada pendidikan empati, etika, dan kerja sosial telah berhasil menciptakan suasana sekolah yang bernuasa saling peduli dan menghormati. Suasana seperti ini ternyata telah memberikan pengaruh positif pada semangat dan keberhasilan siswa dalam proses belajar. Ia begitu yakin bahwa dengan pendidikan karakter yang membuat perilaku siswa menjadi baik, telah meningkatkan keberhasilan akademik anak (Megawangi, 2004:82).

Dalam pendidikan karakter Lickona (1992) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan moral dan moral atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan dan menjelaskan sekaligus nilai-nilai kebajikan. (Megawangi, 2004,hlm: 108).

Moral Knowing adalah hal yang penting untuk diajarkan yang terdiri dari enam hal yaitu: 1) *moral awareness* (kesadaran moral), *knowing moral values* (mengetahui nilai-nilai moral), 3) *perspective taking*, 4) *moral reasoning*, 5) *decion making* dan 6) *self-knowledge*.

Moral Feeling adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada anak yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter yakni: 1) *conscience* (nurani), 2) *self-esteem* (percaya diri), 3) *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), 4) *loving the good* (mencintai kebenaran), 5) *self-control* (mampu mengontrol diri), dan 6) *humility* (kerendahanhatian).

Moral Action adalah bagaimana membua pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil (outcome) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu : 1)

Nanang Sunarya, 2019

PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING DALAM PPKn UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER JUJUR DAN TANGGUNG JAWAB SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kompetensi (*competence*), 2) keinginan (*will*) dan 3) kebiasaan (*habit*). (Megawangi, 2004, hlm: 108).

Hal yang sama diungkapkan oleh Karen E. Bohlin, Deborah Famer, dan Kevin Ryan (2001)¹¹⁹ bahwa membentuk karakter adalah dengan menumbuhkan karakter yang merupakan *the habits of mind, heart, and action*, yang antara ketiganya (pikiran, hati, dan tindakan) adalah saling terkait. (Megawangi, 2004, hlm: 109).

Dalam konteks pembangunan karakter di sekolah, kejujuran menjadi amat penting untuk menjadi karakter anak-anak Indonesia saat ini. Karakter ini dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan di kelas, semisal ketika anak melaksanakan ujian. Perbuatan mencontek merupakan perbuatan yang mencerminkan anak tidak berbuat jujur kepada diri, teman, orang tua, dan gurunya. Dengan mencontek, anak menipu diri, teman, orang tua, dan gurunya. Apa yang ditipu oleh anak. Anak memanipulasi nilai yang didapatkannya seolah-olah merupakan kondisi yang sebenarnya dari kemampuan anak, padahal nilai yang didapatnya bukan merupakan kondisi yang sebenarnya (Kesuma, Triatna, dan Permana, 2013 hlm :16-17).

Orang yang memiliki karakter jujur dicirikan oleh perilaku berikut.

- a. Jika bertekad (inisiasi keputusan) untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah kebenaran dan kemaslahatan;
- b. Jika berkata tidak berbohong (benar apa adanya);
- c. Jika adanya kesamaan antara yang dilakukan hatinya dengan apa yang dilakukannya.

Seseorang yang memiliki karakter jujur akan diminati orang lain, baik dalam konteks persahabatan, bisnis, rekan/mitra kerja, dan sebagainya. Karakter ini merupakan salah satu karakter pokok untuk menjadikan seseorang cinta kebenaran, apapun resiko yang akan diterima dirinya dengan kebenaran yang ia lakukan (Kesuma, Triatna, Permana, 2013 hlm :16-17).

1. Indikator Jujur, Mustari (2011: 19) :

- a. Menyampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya
- b. Bersedia mengakui kesalahan, kekurangan, ataupun keterbatasan diri
- c. Tidak suka mencontek
- d. Tidak suka berbohong
- e. Tidak memanipulasi fakta / informasi

- f. Berani mengakui kesalahan dan sebagainya.
2. Butir-butir Refleksi Kejujuran (Tillman, 2004: 120) meliputi:
- a. Kejujuran adalah mengatakan kebenaran
 - b. Kejujuran berarti tidak kontradiksi dalam pikiran, kata atau tindakan.
 - c. Pikiran, kata-kata. Tindakan jujur menciptakan harmoni.
 - d. Kejujuran adalah kesadaran akan apa yang benar dan sesuai dengan perannya, tindakannya, dan hubungannya.
 - e. Dengan kejujuran, tidak ada kemunafikan atau kepalsuan yang menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan dalam pikiran dan hidup orang lain.
 - f. Kejujuran membuat integritas dalam hidup, karena apa yang ada di dalam dan di luar diri adalah cermin jiwa.
 - g. Kejujuran untuk digunakan pada apa yang kamu percaya
 - h. Ada hubungan yang dalam antara kejujuran dan persahabatan.
 - i. Ketamakan kadang ada pada ketidakjujuran.
 - j. Cukup untuk kebutuhan seorang manusia, tapi tidak untuk ketamakannya.
 - k. Orang yang jujur mengetahui bahwa kita semua saling berhubungan.
 - i. Menjadi jujur pada diri dan dalam menghadapi tugas, akan mendapatkan kepercayaan diri dan mengilhami orang lain (Komalasari dan Saripudin, 2017 hlm: 43-44).

Sedangkan Indikator Tanggung Jawab menurut (Tillman, 2004 : 216) dalam butir-butir Refleksi Tanggung Jawab meliputi :

- a. Jika kita menginginkan kedamaian , kita bertanggung jawab untuk damai.
- b. Jika kita menginginkan dunia yang bersih, kita bertanggung jawab untuk menjaganya.
- c. Bertanggung jawab adalah melakukan tugasmu.
- d. Bertanggung jawab adalah menerima kebutuhanmu, dan melakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya.
- e. Bertanggung jawab melakukan kewajibanmu dengan sepenuh hati.
- f. Saat seseorang bertanggung jawab, ada kepuasan dalam kontribusinya.
- g. Sebagai orang yang bertanggung jawab, saya memiliki sesuatu yang bernilai untuk diberikan, demikian juga orang lain.

- h. Orang yang bertanggung jawab mengetahui bagaimana berlaku adil dan setiap orang mendapat bagiannya.
 - i. Pada hak terdapat tanggung jawab.
 - j. Tanggung jawab bukan hanya suatu kewajiban, tetapi juga sesuatu yang membantu kita mencapai tujuan.
 - k. Setiap orang dapat mengamati dunianya dan melihat keseimbangan antara hak dan kewajibannya.
 - l. Tanggung jawab global memerlukan penghargaan atas seluruh umat manusia.
 - m. Tanggung jawab menggunakan seluruh daya untuk perubahan yang positif.
- (Komalasari dan Saripudin,2017 hlm: 46-47)

Dari pendapat para pakar tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendidikan karakter perlu terus dikonstruksi pada pengembangan peserta didik, karena dengan mengembangkan perilaku karakter ini sangat penting baik untuk pembangunan sumber daya manusianya maupun suasana harmonis kehidupan suatu bangsa yang memiliki warga negara telah sadar penting terhadap perilaku baik. Hal ini tidak terlepas dari peran guru yang merancang pendidikan karakter dapat melahirkan individu-individu yang baik, sehingga apa yang dirancang sebagai sebuah pekerjaan pengemangan perilaku yang bermoral bisa terwujud. Pendidikan karakter harus dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah untuk dijadikan ukuran seseorang dalam mengimpektasikan perbutannya. Perbuatan yang bermoral, berakhlak mulia ini sangat memberikan kontribusi bagi masyarakat madani sehingga harmoni kehidupan bisa terwujud. Dengan pengembangan karakter jujur dan tanggung jawab siswa semoga bisa memberi kontribusi untuk mewujudkan warga negara yang bisa memiliki karakter tersebut.

2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dengan melihat hasil penelitian sebelumnya, saya ingin memperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Purileila dari Universitas Lampung (UNILA) dengan tesisnya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Model *Discovery Learning* Dan Model Konvensional Untuk Meningkatkan Perilaku Tanggungjawab Pada Pembelajaran PKn Siswa Kelas Viii Smp Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran”, hal ini lebih memperjelas tentang

penelitian akan pentingnya langkah-langkah untuk mengetahui mesti disiapkan untuk memudahkan jalannya penelitian nanti maka berhasil dengan baik.

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data dengan kajiannya, didasarkan pada hasil penelitian sebagai berikut. 1. Penggunaan model *Discovery Learning* dalam pembelajaran dapat meningkatkan perilaku bertanggungjawab pada siswa dan lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. artinya bahwa model pembelajaran konvensional kurang efektif dibandingkan dengan model *Discovery Learning* karena model pembelajaran konvensional lebih menekan pembelajaran berpusat pada guru sehingga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih sangat kurang. Dalam pembelajaran konvensional siswa cenderung pasif hanya menerima pembelajaran dari guru sehingga perubahan perilaku bertanggung jawab kurang berkembang. Oleh karena itu, pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional menghasilkan kemampuan siswa yang lemah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai perubahan perilaku bertanggung jawab dan hasil belajar. 2. Ada pengaruh penggunaan model *discovery learning* dalam pembelajaran dalam meningkatkan perilaku bertanggung jawab siswa.